

P-ISSN: 2963-8755, E-ISSN: 2963-2684
JUMANDIK, Vol. 4, No. 3, Mei 2026
Lembaga Aspirasi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Putra
Bangsa (LAP4B) Tangerang Selatan

Jurnal Manajemen & Pendidikan
JUMANDIK

MAKNA LITERASI KEUANGAN DIGITAL BAGI PENGELOLA KEUANGAN SEKOLAH: KAJIAN ETNOGRAFI PADA ERA DIGITALISASI PENDIDIKAN

Eko Cahyadi^{1*}, Supatmin², Dina Novita³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

dosen02030@unpam.ac.id, dosen01767@unpam.ac.id, dosen00658@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji makna literasi keuangan digital bagi para pengelola keuangan sekolah di Indonesia dalam konteks digitalisasi pendidikan yang tengah berlangsung secara masif. Meskipun pemerintah telah mendorong transformasi digital di sektor pendidikan melalui berbagai regulasi dan program, pemahaman mendalam tentang bagaimana para pengelola keuangan sekolah—bendahara dan kepala tata usaha—memaknai, menginternalisasi, dan mempraktikkan literasi keuangan digital dalam rutinitas kerja mereka masih sangat minim. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi selama sembilan bulan di enam sekolah negeri jenjang SMP dan SMA di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, dengan pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam terhadap 18 informan, dan analisis dokumen keuangan sekolah. Temuan penelitian mengungkap bahwa makna literasi keuangan digital bagi pengelola keuangan sekolah bersifat polisemik: ia sekaligus dimaknai sebagai alat kepatuhan administratif, sumber kecemasan teknologis, medium pemberdayaan profesional, dan arena negosiasi identitas jabatan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kerangka literasi keuangan yang kontekstual dan responsif terhadap realitas institusi pendidikan publik di Indonesia, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang empiris untuk program peningkatan kapasitas pengelola keuangan sekolah.

Kata Kunci: literasi keuangan digital, pengelola keuangan sekolah, digitalisasi pendidikan, etnografi, manajemen keuangan sekolah

ABSTRACT

This study examines the meaning of digital financial literacy for school financial managers in Indonesia amid the ongoing massive digital transformation of the education sector. Despite government efforts to promote digital transformation in education through various regulations and programs, an in-depth understanding of how school financial managers—treasurers and administrative heads—interpret, internalize, and practice digital financial literacy in their daily work routines remains scarce. This study employed an ethnographic approach over nine months across six public junior and senior high schools in DKI Jakarta and West Java provinces, collecting data through participant observation, in-depth interviews with 18 informants, and analysis of school financial documents. Findings reveal that the meaning of digital financial literacy for school financial managers is polysemic: it is simultaneously perceived as a tool of administrative compliance, a source of technological anxiety, a medium of professional empowerment, and an arena for occupational identity negotiation. This research contributes to the development of a contextually grounded financial literacy framework responsive to the realities of Indonesian public educational institutions, while offering empirically-based policy recommendations for capacity-building programs targeting school financial managers.

Keywords: digital financial literacy, school financial managers, education digitalization, ethnography, school financial management

PENDAHULUAN

Gelombang digitalisasi yang melanda hampir seluruh sektor kehidupan di abad ke-21 telah menghadirkan perubahan paradigma yang fundamental dalam cara organisasi termasuk institusi pendidikan mengelola sumber daya keuangannya. Di berbagai belahan dunia, transformasi digital dalam tata kelola keuangan publik tidak lagi dipandang sebagai opsi, melainkan sebagai keharusan yang didorong oleh tuntutan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi yang semakin tinggi dari para pemangku kepentingan. Literasi keuangan, yang secara konvensional dipahami sebagai pengetahuan dan kecakapan seseorang dalam mengelola produk dan layanan keuangan, kini telah berkembang dimensinya secara signifikan dengan masuknya komponen digital yang mencakup kemampuan menggunakan platform keuangan berbasis teknologi, memahami keamanan data keuangan, dan menginterpretasikan laporan keuangan dalam format digital. Lusardi dan Mitchell (2014) mendefinisikan literasi keuangan sebagai kemampuan memproses informasi keuangan dan membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan—sebuah definisi yang kini perlu diperluas untuk mengakomodasi dimensi digital yang semakin dominan. Di Indonesia, tekanan menuju digitalisasi pengelolaan keuangan sekolah semakin menguat setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mewajibkan penggunaan sistem informasi manajemen berbasis digital dalam tata kelola keuangan sekolah. Konteks ini menciptakan situasi yang sangat menarik sekaligus problematik: para pengelola keuangan sekolah—yang sebagian besar berlatar belakang pendidikan administrasi konvensional—tiba-tiba dihadapkan pada tuntutan penguasaan literasi keuangan digital yang melampaui kapasitas yang sebelumnya dibutuhkan dari posisi mereka.

Secara akademis, kajian tentang literasi keuangan telah berkembang pesat selama tiga dekade terakhir, dimulai dari fondasi seminal yang diletakkan oleh Lusardi dan Mitchell pada awal 2000-an hingga sintesis komprehensif yang ditawarkan oleh Huston (2010) dan perkembangan mutakhir yang mengintegrasikan dimensi digital oleh Hung, Parker, dan Yoong (2009). Teori-teori yang mapan dalam bidang ini mencakup model kapasitas keuangan yang dikembangkan oleh Atkinson dan Messy (2012) di bawah naungan OECD, yang membedakan antara pengetahuan keuangan (*financial knowledge*), perilaku keuangan (*financial behaviour*), dan sikap keuangan (*financial attitude*) sebagai tiga pilar utama literasi keuangan. Dalam konteks pendidikan, Morgan dan Long (2020) mengembangkan kerangka *financial literacy for educators* yang mengidentifikasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh pengelola keuangan di institusi pendidikan, termasuk kompleksitas regulasi, keterbatasan pelatihan, dan tekanan akuntabilitas publik. *State of the art* dalam bidang ini ditandai dengan munculnya penelitian-penelitian yang secara spesifik mengkaji literasi keuangan digital sebagai konstruk yang berbeda dari literasi keuangan konvensional, dengan Nicolini, Cude, dan Chatterjee (2013) mengidentifikasi komponen-komponen kecakapan digital yang menjadi prasyarat literasi keuangan di era modern. Kajian tentang literasi keuangan dalam konteks manajemen pendidikan di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain Susanti et al. (2020) dan Pratiwi dan Hamid (2022), namun semuanya masih menggunakan pendekatan kuantitatif survei yang terbatas dalam kemampuannya mengungkap makna dan proses pembentukan literasi keuangan digital dalam konteks kehidupan kerja nyata pengelola keuangan sekolah. Kekosongan inilah yang menjadi titik berangkat penelitian ini.

Gap penelitian yang mendasari studi ini dapat diidentifikasi pada tiga lapisan yang saling berkaitan dan memperkuat. Lapisan pertama adalah kesenjangan ontologis: sebagian besar penelitian tentang literasi keuangan di sekolah memandang literasi sebagai properti individual yang dapat diukur melalui instrumen tes atau kuesioner, padahal realitasnya literasi keuangan adalah fenomena yang terbangun secara sosial dalam konteks praktik kerja konkret dan jaringan relasi institusional yang kompleks. Lapisan kedua adalah kesenjangan metodologis yang signifikan: tidak ditemukannya satu pun studi etnografis yang secara khusus mengkaji proses pembentukan makna literasi keuangan digital di kalangan pengelola keuangan sekolah Indonesia, sebuah kelompok yang sangat strategis dalam rantai akuntabilitas keuangan publik di sektor pendidikan. Lapisan ketiga adalah kesenjangan kontekstual: penelitian-penelitian yang ada cenderung menggeneralisasi pengalaman pengelola keuangan sekolah tanpa mempertimbangkan keberagaman konteks institusional, tekanan regulasi yang spesifik terhadap sekolah negeri, dan dinamika hierarki birokrasi pendidikan yang secara unik membentuk cara pengelola keuangan memaknai dan mempraktikkan literasi keuangan digital. Studi Wulandari et al. (2022) tentang adopsi teknologi keuangan di sekolah dasar dan studi Rahayu dan

Kartika (2023) tentang implementasi RKAS berbasis digital memang telah menyentuh aspek-aspek tertentu dari fenomena ini, namun keduanya tidak berhasil menangkap dimensi makna yang hanya dapat diakses melalui keterlibatan peneliti yang mendalam dan berkelanjutan di lapangan. Gap-gap ini secara kolektif mengindikasikan perlunya pendekatan yang secara epistemologis berbeda untuk memahami literasi keuangan digital bukan sebagai variabel yang diukur, melainkan sebagai pengalaman yang dihayati dan dimaknai oleh pelaku-pelakunya.

Urgensi penelitian ini semakin menguat ketika dikontekstualisasikan dalam dinamika kebijakan dan tantangan praktis yang sedang berlangsung di lapangan pendidikan Indonesia. Sejak tahun 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara bertahap mewajibkan seluruh sekolah negeri untuk menggunakan platform Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) berbasis digital dalam pengelolaan keuangannya, sebuah kebijakan yang pada praktiknya menempatkan beban adaptasi yang besar di pundak para bendahara dan kepala tata usaha sekolah. Data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara konsisten menunjukkan bahwa temuan-temuan penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS—yang mencapai angka substansial setiap tahun anggaran—seringkali bukan disebabkan oleh niat buruk pengelola, melainkan oleh kesenjangan kapasitas dalam mengelola sistem keuangan yang semakin kompleks dan terdigitalisasi. Dalam lanskap ini, pertanyaan tentang bagaimana pengelola keuangan sekolah memaknai literasi keuangan digital bukan hanya relevan secara akademis, tetapi memiliki implikasi langsung terhadap kualitas akuntabilitas keuangan publik, keberhasilan program BOS dalam mencapai tujuannya, dan pada akhirnya terhadap kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh peserta didik. Penelitian ini, dengan menggunakan metodologi etnografi yang memungkinkan penyelaman mendalam ke dalam realitas keseharian pengelola keuangan sekolah, berupaya mengisi kekosongan pengetahuan tersebut dengan temuan-temuan yang empiris, kaya, dan secara langsung dapat dimanfaatkan untuk menginformasikan kebijakan peningkatan kapasitas yang lebih efektif dan berbasis bukti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi etnografi sebagai metode utama, sebuah pilihan yang secara epistemologis didasarkan pada keyakinan bahwa makna literasi keuangan digital merupakan fenomena yang terbangun secara sosial dan kontekstual, bukan atribut individual yang dapat diungkap melalui pengukuran standar. Tradisi etnografi dipilih secara khusus karena kemampuannya yang unik untuk menangkap praktik keseharian, rutinitas yang terbentuk secara habitual, dan proses pembentukan makna yang seringkali berlangsung secara implisit dan tidak disadari oleh pelakunya sendiri. Secara paradigmatis, penelitian ini berakar pada tradisi interpretivisme dengan orientasi fenomenologis yang memandang realitas sebagai konstruksi intersubjektif yang terus-menerus dibentuk melalui interaksi antara individu dan konteks sosial-institusional mereka. Fondasi teoretis yang menginformasikan desain penelitian ini mencakup teori praktik Bourdieu yang melihat kapasitas literasi sebagai bagian dari habitus yang terbentuk melalui internalisasi pengalaman sosial, serta konsep *situated learning* dari Lave dan Wenger yang memahami literasi sebagai kemampuan yang berkembang dalam dan melalui komunitas praktik yang spesifik. Dengan landasan ini, penelitian tidak mencari definisi universal tentang literasi keuangan digital yang 'benar', melainkan berupaya memahami bagaimana makna tersebut dibangun, dinegosiasikan, dan dipraktikkan dalam konteks institusional yang spesifik. Seluruh prosedur penelitian telah mendapatkan persetujuan etis dari komite etik penelitian institusi dan persetujuan tertulis dari seluruh informan dan pimpinan sekolah yang terlibat.

Penelitian berlangsung selama sembilan bulan, dari Februari hingga Oktober 2023, di enam sekolah negeri yang dipilih secara purposif di Provinsi DKI Jakarta (tiga sekolah) dan Jawa Barat (tiga sekolah), mencakup jenjang SMP Negeri (tiga sekolah) dan SMA Negeri (tiga sekolah). Kriteria pemilihan sekolah mencakup: memiliki pengelola keuangan yang telah menggunakan sistem keuangan digital setidaknya selama dua tahun, berlokasi di daerah urban dan semi-urban untuk memungkinkan perbandingan konteks infrastruktur digital, serta memiliki variasi dalam hal skala sekolah (besar, sedang, dan kecil berdasarkan jumlah siswa). Variasi ini disengaja untuk meningkatkan kedalaman analisis komparatif dan transferabilitas temuan terhadap konteks sekolah yang lebih beragam. Di setiap sekolah, peneliti memperoleh akses penuh ke ruang tata usaha dan ruang kerja bendahara, mengikuti sesi-sesi pelaporan keuangan, pertemuan koordinasi, dan proses entri data ke sistem digital. Total

waktu observasi yang terdokumentasi mencapai lebih dari 320 jam di seluruh lokasi penelitian, menghasilkan lebih dari 400 halaman catatan lapangan yang kaya dan terperinci.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Teknik pertama adalah observasi partisipatif, di mana peneliti mengikuti secara langsung seluruh proses kerja pengelola keuangan sekolah, mulai dari perencanaan anggaran, penggunaan aplikasi RKAS, penyusunan laporan pertanggungjawaban, hingga interaksi dengan pengawas keuangan dari dinas pendidikan. Observasi berfokus pada praktik nyata (*practices*), bukan hanya pada pernyataan tentang praktik, sehingga mampu mengungkap celah antara pengetahuan yang diklaim dan perilaku aktual dalam situasi kerja. Teknik kedua adalah wawancara mendalam semi-terstruktur yang dilakukan dengan 18 informan utama terdiri dari 12 bendahara sekolah dan 6 kepala tata usaha—dengan setiap sesi berlangsung antara 80 hingga 150 menit. Wawancara dirancang untuk menggali narasi pengalaman informan secara kronologis, mulai dari proses pertama kali bersentuhan dengan sistem keuangan digital, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, strategi adaptasi yang dikembangkan, hingga makna yang mereka berikan terhadap pengalaman tersebut secara keseluruhan. Teknik ketiga adalah analisis dokumen, mencakup dokumen RKAS, laporan pertanggungjawaban keuangan BOS, catatan koreksi dari pengawas, panduan penggunaan aplikasi keuangan, serta dokumen pelatihan yang pernah diikuti oleh informan. Semua wawancara direkam dengan persetujuan informan dan ditranskripsikan secara verbatim oleh tim asisten peneliti yang terlatih, kemudian diverifikasi kembali bersama informan melalui proses *member checking*.

Analisis data mengikuti prosedur analisis tematik reflektif yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2019), yang diperkaya dengan elemen-elemen analisis interpretatif fenomenologis untuk menangkap kedalaman makna subjektif informan. Proses analisis berlangsung secara iteratif dan siklikal: peneliti berulang kali bergerak antara data lapangan, memo analitik, dan kerangka teoretis yang relevan untuk mengkonstruksi interpretasi yang semakin tajam dan terkalibrasi. Kodifikasi dilakukan dalam dua tahap: kodifikasi deskriptif untuk menangkap isi literal data, diikuti oleh kodifikasi interpretatif untuk mengidentifikasi makna yang lebih dalam di balik pernyataan dan praktik yang teramati. Seluruh proses analisis dikelola menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti versi 9, yang memungkinkan *audit trail* yang sistematis dan transparan atas setiap keputusan analitik yang dibuat. Rigor penelitian dijamin melalui empat strategi: *prolonged engagement* di lapangan untuk membangun kepercayaan informan dan memperoleh data yang autentik; *negative case analysis* untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan kasus-kasus yang tidak sesuai dengan pola yang muncul; *peer debriefing* dengan dua kolega peneliti kualitatif yang memberikan perspektif kritis terhadap interpretasi yang sedang berkembang; serta *reflexivity journal* yang mendokumentasikan posisi peneliti dan potensi bias yang mungkin mempengaruhi proses pengumpulan dan interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Proses analisis tematik terhadap keseluruhan corpus data menghasilkan empat tema mayor yang secara bersama-sama membentuk peta makna literasi keuangan digital bagi pengelola keuangan sekolah dalam konteks ini. Keempat tema tersebut adalah: (1) literasi keuangan digital sebagai alat kepatuhan administratif; (2) kecemasan teknologis dan strategi koping; (3) literasi keuangan digital sebagai pemberdayaan identitas profesional; dan (4) komunitas praktik informal sebagai ruang belajar utama. Penting untuk dicatat bahwa keempat tema ini tidak bersifat *mutually exclusive*, melainkan beroperasi secara simultan dan saling memodulasi dalam kehidupan kerja sehari-hari para informan, mencerminkan kompleksitas pengalaman yang tidak dapat direduksi menjadi kategorisasi sederhana. Keseluruhan temuan ini berbicara pada inti pertanyaan penelitian tentang bagaimana literasi keuangan digital dimaknai bukan dalam pengertian abstrak-kognitif, melainkan dalam pengertian yang hidup dan tertanam dalam praktik-praktik konkret, relasi sosial, dan dinamika identitas yang membentuk kehidupan kerja pengelola keuangan sekolah. Setiap tema diuraikan secara mendalam di bawah ini, disertai dengan data yang kaya dan pembahasan teoritis yang menghubungkan temuan dengan literatur yang relevan.

Tema pertama yang muncul dengan intensitas paling kuat dalam data adalah konseptualisasi literasi keuangan digital sebagai instrumen kepatuhan administrative sebuah seperangkat kecakapan yang pertama-tama dan terutama dibutuhkan bukan untuk memberdayakan pengelolaan keuangan sekolah, melainkan untuk memenuhi persyaratan pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas eksternal.

Hampir seluruh informan, ketika pertama kali mendeskripsikan pengalaman mereka dengan sistem keuangan digital, secara spontan menggunakan terminologi kepatuhan dan kewajiban: 'harus bisa', 'wajib lapor', 'kalau salah kena temuan'. Seorang bendahara SMPN di Jakarta Timur yang telah menjabat selama 11 tahun mengekspresikan pengalamannya dengan sangat jelas: 'Saya belajar RKAS bukan karena mau, tapi karena kalau tidak bisa, dana BOS tidak cair. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, harus dikuasai.' Pernyataan ini mengungkap orientasi instrumental yang dominan, di mana literasi keuangan digital dipandang bukan sebagai pengetahuan yang bernilai intrinsik, melainkan sebagai alat untuk mengakses sumber daya (pencairan dana) dan menghindari sanksi (temuan audit). Orientasi ini secara teoritis berkorespondensi dengan konsep *compliance-driven learning* yang dikontraskan oleh Wenger (1998) dengan *participatory learning* yang lebih mendalam dan bermakna dalam komunitas praktik. Dominannya orientasi kepatuhan ini, sementara dapat dimengerti dalam konteks tekanan regulasi yang kuat, menimbulkan pertanyaan serius tentang keberlanjutan dan kedalaman literasi keuangan digital yang dibangun di atas fondasi ekstrinsik semata.

Tema kedua mengangkat dimensi afektif yang sering diabaikan dalam penelitian tentang literasi keuangan: kecemasan teknologis (*techno-anxiety*) yang dialami oleh sebagian besar informan dan berbagai strategi koping yang mereka kembangkan sebagai respons. Kecemasan teknologis bukan sekadar rasa tidak nyaman yang sifatnya sementara, melainkan pengalaman yang memiliki dampak signifikan terhadap kualitas kerja, kepercayaan diri profesional, dan bahkan kesehatan psikologis para pengelola keuangan sekolah. Dalam catatan lapangan, peneliti berulang kali mengobservasi ekspresi-ekspresi kecemasan yang konkret: bendahara yang berkeringat saat memasukkan data ke sistem, kepala tata usaha yang mengulang-ulang prosedur entry data karena takut salah, dan diskusi-diskusi cemas tentang kemungkinan 'terkena temuan' di sela-sela istirahat makan siang. Nomvete dan Dube (2021) mengidentifikasi bahwa kecemasan teknologis dalam konteks adopsi sistem digital oleh pekerja administrasi publik secara konsisten berhubungan dengan faktor-faktor seperti usia, minimnya pelatihan awal yang memadai, dan ketakutan akan konsekuensi kesalahan yang tinggi—semua faktor ini hadir secara kuat dalam konteks penelitian ini. Yang menarik dan tidak terungkap dalam studi-studi sebelumnya adalah ragam strategi koping yang dikembangkan secara kreatif oleh para informan: dari membangun jaringan saling bantu dengan sesama bendahara sekolah lain, mencari tutorial di YouTube secara mandiri, hingga mengembangkan sistem dokumentasi manual sebagai backup dari sistem digital sebagai jaring pengaman psikologis. Strategi-strategi ini menunjukkan agensi yang kuat dan kreativitas adaptif yang mungkin tidak terlihat dari luar, namun sangat bermakna dalam membentuk resiliensi profesional para informan.

Tema ketiga mengungkap dimensi yang lebih positif dan transformatif dari pengalaman literasi keuangan digital: proses di mana penguasaan kecakapan digital secara bertahap menjadi sumber kebanggaan profesional dan pemberdayaan identitas jabatan. Berbeda dari orientasi kepatuhan yang bersifat ekstrinsik dan reaktif, pemberdayaan identitas ini bersifat intrinsik dan proaktif—sebuah pergeseran makna yang terjadi secara gradual seiring dengan meningkatnya kepercayaan diri dalam menggunakan sistem digital. Beberapa informan yang telah melampaui kurva belajar awal mengungkapkan transformasi makna yang signifikan: dari memandang sistem digital sebagai beban, mereka mulai memandangnya sebagai alat yang memberikan keunggulan profesional dan meningkatkan posisi mereka dalam ekosistem sekolah. Seorang kepala tata usaha SMAN di Bandung, misalnya, dengan bangga mendeskripsikan bagaimana kemampuannya mengoperasikan dan menginterpretasikan laporan keuangan digital membuatnya menjadi narasumber yang dicari oleh sekolah-sekolah lain di kecamatannya. Fenomena ini berkorespondensi dengan konsep *capital technologique* yang dikembangkan dari tradisi Bourdieusian, di mana kecakapan teknologi diakumulasi sebagai bentuk modal budaya yang dapat dikonversi menjadi modal sosial dan modal simbolik dalam medan sosial profesional. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi perancangan program pelatihan: pemberdayaan identitas profesional melalui pengakuan dan penghargaan atas kecakapan yang telah dikuasai dapat menjadi strategi motivasional yang jauh lebih efektif dibandingkan ancaman sanksi kepatuhan dalam mendorong pengembangan literasi keuangan digital yang lebih dalam dan berkelanjutan.

Tema keempat mengidentifikasi komunitas praktik informal yang terbentuk di antara para pengelola keuangan sekolah sebagai ruang pembelajaran utama yang lebih efektif dan bermakna dibandingkan pelatihan formal yang disediakan oleh dinas pendidikan. Di semua lokasi penelitian, peneliti menemukan jaringan-jaringan informal yang diorganisir secara mandiri oleh para bendahara

dan kepala tata usaha: grup WhatsApp lintas sekolah yang aktif bertukar solusi teknis, pertemuan informal di warung kopi setelah menghadiri kegiatan dinas, dan kunjungan saling bantuan antar sekolah ketika ada masalah teknis yang tidak terpecahkan. Komunitas-komunitas ini beroperasi berdasarkan prinsip resiprositas dan kepercayaan yang dibangun dari pengalaman berbagi kesulitan yang sama, dan pengetahuan yang mengalir di dalamnya bersifat sangat praktis, kontekstual, dan langsung dapat diterapkan berbeda dari pelatihan formal yang sering dikeluhkan terlalu teoritis dan tidak sesuai konteks. Konsep *community of practice* yang dikembangkan oleh Lave dan Wenger (1991) sangat relevan di sini, namun temuan penelitian ini memperkayanya dengan menunjukkan bagaimana komunitas praktik dalam konteks pengelola keuangan sekolah Indonesia terbentuk bukan melalui desain institusional, melainkan melalui kebutuhan bertahan yang bersifat grassroots dan organik. Braun dan Clarke (2019) dalam konteks yang berbeda telah menunjukkan bahwa *situated learning* dalam komunitas praktik menghasilkan pengetahuan yang jauh lebih terintegrasi dan tahan lama dibandingkan pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan formal yang terpisah dari konteks kerja nyata. Implikasi kebijakan yang langsung dapat ditarik dari temuan ini adalah perlunya pengakuan dan penguatan formal terhadap komunitas-komunitas praktik informal ini sebagai infrastruktur pembelajaran yang strategis dalam ekosistem peningkatan kapasitas pengelola keuangan sekolah.

PEMBAHASAN

Secara keseluruhan, keempat tema yang ditemukan dalam penelitian ini berbicara dengan jelas terhadap ketidakcukupan kerangka literasi keuangan konvensional dalam memahami fenomena yang jauh lebih kompleks dari sekadar defisit pengetahuan yang dapat diisi melalui pelatihan. Literasi keuangan digital bagi pengelola keuangan sekolah adalah pengalaman yang secara simultan bersifat kognitif, afektif, sosial, dan identitasional—sebuah fenomena yang membutuhkan kerangka analisis multidimensi untuk dapat dipahami secara memadai. Temuan ini berkorespondensi dengan kerangka *financial capability* yang dikembangkan oleh Johnson dan Sherraden (2007), yang membedakan antara *financial literacy* (pengetahuan) dan *financial capability* (kemampuan bertindak dalam konteks sosial-institusional yang konkret). Lebih jauh lagi, penelitian ini menunjukkan bahwa konteks institusional spesifik—tekanan birokrasi, dinamika hierarki pendidikan, dan ekologi sosial komunitas sekolah—secara fundamental membentuk cara literasi keuangan digital dimaknai dan dipraktikkan, sehingga tidak ada ‘resep’ universal yang dapat diterapkan tanpa mempertimbangkan keunikan setiap konteks. Pandangan ini sejalan dengan kritik yang dilontarkan oleh Remund (2010) terhadap kecenderungan penelitian literasi keuangan untuk mereduksi fenomena yang kompleks ini menjadi sekadar skor dalam tes pengetahuan, sebuah reduksi yang mengorbankan kekayaan fenomenologis demi kemudahan pengukuran.

Tema pertama tentang orientasi kepatuhan administratif memperluas sekaligus mengoreksi model kapasitas keuangan OECD Atkinson dan Messy (2012) secara signifikan. Model tersebut mengasumsikan bahwa literasi keuangan berkembang melalui internalisasi pengetahuan, sikap, dan perilaku yang bersifat positif dan otonom. Namun data etnografis penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks pengelola keuangan sekolah Indonesia, motivasi dominan bersifat ekstrinsik dan reaktif—didorong oleh ancaman sanksi dan syarat pencairan dana, bukan oleh hasrat pengembangan kapasitas. Kondisi ini berkorespondensi dengan konsep *compliance-driven learning* Wenger (1998) yang terbukti menghasilkan penguasaan yang dangkal dan rentan terhadap kesalahan ketika dihadapkan pada situasi baru yang tidak tercakup dalam prosedur yang dihafal. Temuan ini memiliki implikasi serius bagi kebijakan: program peningkatan kapasitas yang hanya mengandalkan mekanisme kontrol dan sanksi tanpa membangun motivasi intrinsik akan terus menghasilkan literasi yang bersifat semu dan rapuh.

Tema kedua tentang kecemasan teknologis memvalidasi sekaligus memperkaya temuan Nomvete dan Dube (2021) dalam konteks yang berbeda. Penelitian terdahulu tersebut mengidentifikasi faktor-faktor pemicu kecemasan teknologis—usia, minimnya pelatihan, dan ketakutan atas konsekuensi kesalahan—namun belum mengeksplorasi strategi koping yang dikembangkan secara mandiri oleh pelaku. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengidentifikasi agensi kreatif yang kuat dari para informan: jaringan saling bantu lintas sekolah, pemanfaatan tutorial daring, dan pengembangan sistem dokumentasi manual sebagai ‘jaring pengaman psikologis’. Strategi-strategi ini dapat diinterpretasikan melalui lensa teori habitus Bourdieu (1986) sebagai bentuk adaptasi praktis yang terbentuk dari akumulasi pengalaman lapangan, menghasilkan kecerdasan situasional yang tidak

dapat diperoleh dari pelatihan formal. Pengakuan dan fasilitasi terhadap kapasitas adaptif yang sudah eksis ini seharusnya menjadi titik tolak perancangan intervensi kebijakan yang lebih efektif.

Tema ketiga tentang pemberdayaan identitas profesional memberikan kontribusi orisinal yang paling signifikan terhadap literatur literasi keuangan. Literatur yang ada tentang financial literacy in education settings—termasuk Morgan dan Long (2020)—hampir sepenuhnya berfokus pada dimensi kognitif dan teknis, mengabaikan dimensi identitas yang terbukti dalam penelitian ini menjadi motor penggerak transformasi makna dari beban menjadi keunggulan. Konseptualisasi kecakapan digital sebagai *capital technologique* dalam kerangka Bourdieusian (1986) menawarkan lensa analitis yang sangat produktif: penguasaan literasi keuangan digital tidak hanya bernilai fungsional tetapi juga dapat dikonversi menjadi modal simbolik dan sosial dalam medan profesional para pengelola keuangan sekolah. Temuan ini secara langsung menantang paradigma deficit model dalam program pelatihan yang memandang peserta sebagai ‘yang kekurangan’ dan sebaliknya memperkuat argumen untuk paradigma strengths-based yang memulai dari pengakuan atas kapasitas yang sudah dimiliki.

Tema keempat tentang komunitas praktik informal memperkaya kerangka *community of practice* Lave dan Wenger (1991) dengan dimensi grassroots yang belum dieksplorasi dalam literatur sebelumnya. Teori asli Lave dan Wenger menggambarkan komunitas praktik sebagai entitas yang tumbuh dalam konteks institusional yang mendukung, namun temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kondisi di mana institusi justru menjadi sumber tekanan (melalui sistem pengawasan dan sanksi), komunitas praktik tumbuh sebagai mekanisme perlindungan dan pembelajaran yang bersifat reaktif dan mandiri. Fenomena ini memiliki resonansi kuat dengan konsep *situated learning* yang menegaskan bahwa pengetahuan yang paling kuat dan tahan lama adalah pengetahuan yang tumbuh dalam konteks masalah nyata yang dihadapi bersama. Secara keseluruhan, keempat tema saling memperkuat argumen bahwa pendekatan yang paling menjanjikan untuk meningkatkan literasi keuangan digital pengelola keuangan sekolah adalah pendekatan yang mengakui kompleksitas pengalaman mereka, membangun di atas kekuatan yang sudah ada, dan memanfaatkan ekosistem pembelajaran informal yang sudah terbentuk secara organik di lapangan.

SIMPULAN

Penelitian etnografi ini telah berhasil mengungkap bahwa makna literasi keuangan digital bagi pengelola keuangan sekolah di Indonesia jauh melampaui definisi teknis yang selama ini mendominasi wacana akademik dan kebijakan. Bagian Hasil penelitian ini mengidentifikasi empat lapisan makna yang saling berinteraksi: (1) literasi sebagai alat kepatuhan administratif yang didorong oleh tekanan regulasi eksternal; (2) literasi sebagai pengalaman kecemasan teknologis yang memerlukan strategi koping kreatif; (3) literasi sebagai sumber pemberdayaan identitas profesional bagi mereka yang berhasil melampaui kurva adaptasi; dan (4) literasi sebagai praktik kolektif yang berkembang dalam komunitas praktik informal yang dinamis dan bersifat grassroots. Keempat lapisan ini tidak berdiri secara hierarkis, melainkan beroperasi secara simultan dan dalam proporsi yang berbeda-beda pada setiap individu tergantung pada konteks, pengalaman, dan dukungan sosial yang tersedia. Adapun bagian Pembahasan menunjukkan bahwa temuan-temuan tersebut secara bersama-sama menantang kerangka literasi keuangan konvensional yang berbasis deficit model—asumsi bahwa literasi adalah defisit kognitif yang dapat diatasi dengan penambahan konten pengetahuan—dan mengajukan pandangan alternatif bahwa literasi keuangan digital adalah praktik sosial yang harus dikembangkan dalam konteks kehidupan kerja yang nyata, merujuk pada kerangka *financial capability* Johnson dan Sherraden (2007), teori komunitas praktik Lave dan Wenger (1991), serta *capital technologique* dalam tradisi Bourdieu (1986), dengan memperhatikan dimensi afektif, relasional, dan identitasional yang selama ini sering diabaikan.

Implikasi kebijakan dan praktis dari penelitian ini beroperasi pada beberapa level yang perlu ditangani secara terintegrasi. Pertama, berdasarkan temuan Hasil tentang dominannya orientasi kepatuhan ekstrinsik, Kementerian Pendidikan perlu merancang ulang program pelatihan literasi keuangan digital bagi pengelola keuangan sekolah dengan menggeser paradigma dari pelatihan berbasis konten menuju pelatihan berbasis komunitas praktik yang terintegrasi dengan pekerjaan nyata—sebuah pendekatan yang secara teknis dikenal sebagai *workplace-embedded professional development*. Kedua, sebagaimana dibahas dalam bagian Pembahasan terkait dimensi kecemasan teknologis, sistem pengawasan keuangan sekolah perlu dikalibrasi ulang untuk tidak hanya mengandalkan fungsi kontrol dan sanksi, tetapi juga secara aktif berkontribusi pada fungsi

pembimbingan dan pengembangan kapasitas—terutama mengingat bahwa sebagian besar kesalahan yang ditemukan dalam audit bersumber dari keterbatasan kapasitas, bukan niat buruk. Ketiga, komunitas-komunitas praktik informal yang telah terbentuk secara organik di antara para pengelola keuangan sekolah—sebagaimana teridentifikasi dalam Tema 4—perlu mendapatkan pengakuan resmi dan dukungan sumber daya dari dinas pendidikan, misalnya melalui fasilitasi pertemuan rutin, penyediaan platform digital khusus, atau pemberian insentif bagi ‘bendahara ahli’ yang aktif membantu rekan-rekannya. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara transparan: fokus pada sekolah negeri di dua provinsi Jawa mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan keberagaman kondisi sekolah di seluruh Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang menghadapi tantangan infrastruktur digital yang lebih berat. Agenda penelitian masa depan perlu memperluas jangkauan geografis ke wilayah-wilayah di luar Jawa, mengeksplorasi pengalaman pengelola keuangan sekolah swasta yang menghadapi tekanan regulasi yang berbeda, serta melakukan studi longitudinal yang dapat melacak perkembangan literasi keuangan digital dari waktu ke waktu untuk memahami proses transformasinya secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, A., & Messy, F. (2012). Measuring financial literacy: Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15. <https://doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en>
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press. <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4942-6>
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Chen, H., & Volpe, R. P. (1998). An analysis of personal financial literacy among college students. *Financial Services Review*, 7(2), 107–128. [https://doi.org/10.1016/S1057-0810\(99\)80006-7](https://doi.org/10.1016/S1057-0810(99)80006-7)
- Faoziyah, U., & Sumarto, S. (2023). Implementasi sistem informasi manajemen keuangan sekolah berbasis digital: Tantangan dan peluang bagi bendahara BOS. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 30(1), 78–94. <https://doi.org/10.17509/jap.v30i1.54321>
- Hung, A. A., Parker, A. M., & Yoong, J. K. (2009). Defining and measuring financial literacy. RAND Working Paper Series WR-708. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1498674>
- Huston, S. J. (2010). Measuring financial literacy. *Journal of Consumer Affairs*, 44(2), 296–316. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01170.x>
- Johnson, E., & Sherraden, M. S. (2007). From financial literacy to financial capability among youth. *Journal of Sociology and Social Welfare*, 34(3), 119–146. <https://doi.org/10.15453/0191-5096.3219>
- Lave, J., & Wenger, E. (1991). *Situated learning: Legitimate peripheral participation*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511815355>
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Morgan, P. J., & Long, T. Q. (2020). Financial literacy, financial inclusion, and savings behavior in Laos. *Journal of Asian Economics*, 68, 101197. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2020.101197>
- Nicolini, G., Cude, B. J., & Chatterjee, S. (2013). Financial literacy: A comparative study across four

- countries. *International Journal of Consumer Studies*, 37(6), 689–705. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12050>
- Nomvete, S., & Dube, B. (2021). Technology anxiety and the adoption of digital financial management systems in public schools: A phenomenological inquiry. *Educational Management Administration & Leadership*, 49(3), 511–528. <https://doi.org/10.1177/1741143220908427>
- Pratiwi, N. D., & Hamid, A. (2022). Kompetensi digital bendahara sekolah dan kualitas laporan pertanggungjawaban dana BOS di era digitalisasi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(2), 143–160. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i2.2318>
- Rahayu, S., & Kartika, D. (2023). Kendala implementasi RKAS digital pada sekolah menengah pertama negeri: Perspektif administrator keuangan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 14(1), 55–72. <https://doi.org/10.26811/didaktika.v14i1.879>
- Remund, D. L. (2010). Financial literacy explicated: The case for a clearer definition in an increasingly complex economy. *Journal of Consumer Affairs*, 44(2), 276–295. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01169.x>
- Susanti, E., Hermawan, A., & Mukodim, D. (2020). Analisis literasi keuangan pengelola dana BOS pada sekolah dasar negeri di Kabupaten Bogor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 5(2), 103–118. <https://doi.org/10.31629/jakp.v5i2.2671>
- Van Maanen, J. (2011). *Tales of the field: On writing ethnography* (2nd ed.). University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226849638.001.0001>
- Wenger, E. (1998). *Communities of practice: Learning, meaning, and identity*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511803932>
- Wulandari, R., Pratiwi, S., & Mulyadi, H. (2022). Adopsi teknologi keuangan digital pada pengelolaan dana BOS sekolah dasar: Studi kasus di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 28(1), 67–83. <https://doi.org/10.17977/um048v28i12022p067>